

---

---

**ANALISIS KECUKUPAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BERDASARKAN  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BIREUEN**  
(*Analaysis The Adequacy Of Green Open Space (GOS) Based On  
Detailed Spatial Planing In Bireuen City*)

**Danil Fahreza Pohan<sup>1</sup>, Muhammad Rusdi<sup>1</sup>, Sugianto<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

Email: danilfahrezapohan@gmail.com

**Abstrak.** Pesatnya pertumbuhan penduduk dan tingginya perkembangan pembangunan, menyebabkan banyaknya kawasan yang beralih fungsi menjadi kawasan yang bukan peruntukan yang sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi untuk menunjang kualitas hidup masyarakat di dalam suatu kota baik dari segi lingkungan maupun kesehatan. Pesatnya perkembangan suatu kota tentu banyak menarik minat masyarakat untuk pindah menuju kota tersebut, semakin meningkatnya jumlah penduduk tentu juga meningkatkan kebutuhan akan oksigen. Untuk itu Kota Bireuen dituntut mampu menyediakan RTH untuk mengimbangi kebutuhan oksigen masyarakat kota itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung ketersediaan RTH yang direncanakan di dalam RDTR Kota Bireuen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada lah metode deskriptif dengan teknik survai. Sedangkan analisis kecukupan RTH menggunakan rumus berdasarkan luas daerah dibagi dengan RTH yang tersedia. Hasil perhitungan analisis RTH di dapat bahwasannya RTH Kota Bireuen sebesar 46,96%.

**Kata Kunci:** Bireuen, RTH, RDTR

**Abstrack.** The rapid growth of population and the high development of the developmental, causing the number of areas that switch functions to areas that are not appropriate designation established by the government including green open space (GOS) that serves to support the quality of life of people in a city both in terms of environment and health . The rapid development of a city would attract many people to move to the city, the increasing number of people of course also increases the need for oxygen. For that Bireuen City is required to provide GOS to compensate for the oxygen needs of the people of the city itself. This study aims to calculate the planned GOS availability in the DSP of Bireuen City. The method used in this research is descriptive method with survey technique. While the analysis of GOS adequacy using the formula based on the area divided by the available GOS. The calculation result of GOS analysis can be that the GOS of Bireuen City is 46.96%.

**Keyword:** Bireuen, GOS, DSP

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan peradaban manusia sejalan dengan meningkatnya perkembangan jumlah penduduk serta pembangunan pada suatu daerah menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan lahan. Peningkatan ini mengacu pada perubahan penggunaan lahan dan pola perencanaan tata ruang wilayah. Perubahan tata ruang wilayah dapat menyebabkan adanya perubahan fungsi kawasan yang melanggar ketentuan yang telah di tetapkan dalam undang-undang rencana tata ruang dan wilayah baik nasional maupun perkotaan (Bahri *et al.*, 2012).

Rencana detail tata ruang (RDTR) merupakan rencana yang terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan pengaturan

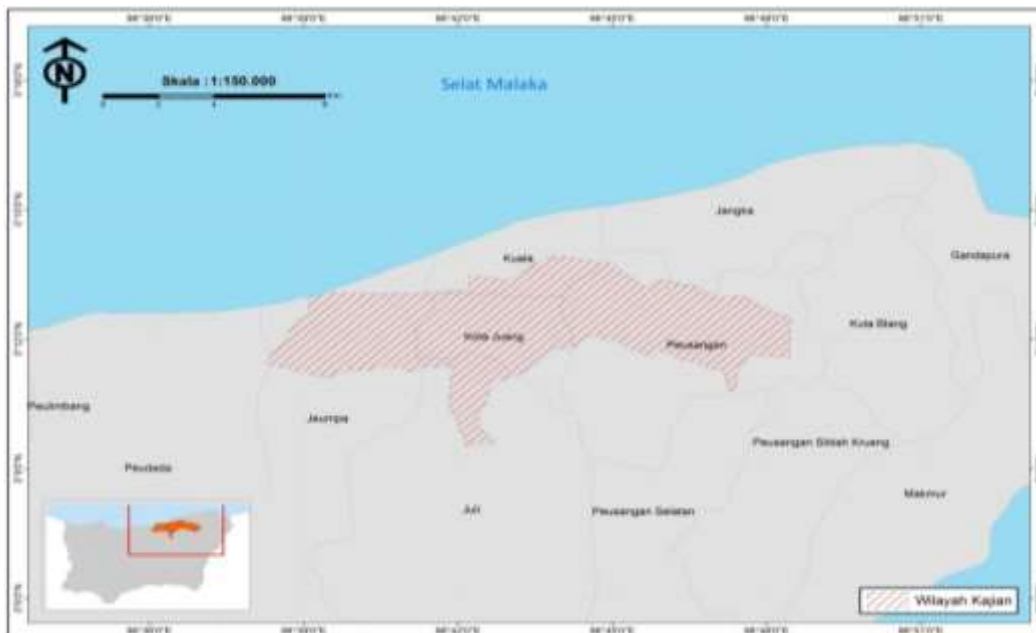
zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan. Didalam suatu kawasan terdapat ruang terbuka hijau (RTH) yang merupakan salah satu penunjang kualitas hidup masyarakat di suatu kota dalam segi lingkungan maupun kesehatannya (Pemerintahan Republik Indonesia, 2010).

Selanjutnya (Santoso *et al.*, 2012) menyebutkan ruang terbuka hijau (RTH) adalah ruang yang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan yang dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan seterusnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa proporsi RTH setiap kota minimal 30% dari luas wilayah kota (Pemerintahan Republik Indonesia, 2007).

Kota Bireuen merupakan kota hasil pengembangan dari Kabupaten Bireuen. Dimana RDTR Kota Bireuen yang telah dibuat masih dalam bentuk rencana dalam arti belum disahkan, yang mana tujuan dari pembuatan RDTR ini untuk mengatur pembagian rencana pembangunan kota itu sendiri. Untuk itu kajian ini dilakukan untuk mereview seberapa besar RTH yang telah direncanakan di dalam RDTR Kota Bireuen. Apakah sudah cukup sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan di Kota Bireuen yang terletak di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 1. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei - September 2017 dan pengelolaan data secara spasial dilakukan di Laboratorium Pengindraan Jauh dan Kartografi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.



Gambar 1. Wilayah Kajian

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dianalisis menggunakan sistem informasi geografis SIG dengan metode *reclassiffy*. Dimana peta dalam bentuk JPEG di *georeferencing* yang bertujuan untuk mengubah menjadi *shapefile*. Kemudian dilakukan digitasi untuk melihat

---

Analisis Kecukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota Bireuen.

penggunaan lahan yang telah direncanakan didalam RDTR dan kemudian dilakukan *reclassiffy* untuk mengelaskan penggunaan lahan sesuai dengan yang ditentukan didalam RDTR pada *attribute table*. Selanjutnya gunakan fitur *select* untuk memilih RTH saja untuk memudahkan dalam perhitungan luas.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

RDTR Kota Bireuen merujuk kepada RTRW tahun 2013-2023 dalam (Peraturan Pemerintah Kabupaten Bireuen, 2013). Pada RDTR dapat dilihat bahwa perencanaan pembangunan pada Kota Bireuen sudah di bagi ke dalam dua kawasan yaitu kawasan budidaya dan non-budidaya.

Kawasan yang terbagi menjadi RTH terdiri dari empat kawasan. Dimana kawasan tersebut masuk ke dalam kawasan budidaya dan non-budidaya. Adapun kawasan terluas pada RDTR adalah kawasan pemukiman. Hal ini menunjukkan fenomena bahwa Kota Bireuen merupakan kota yang sedang fokus pada perkembangan areal tempat tinggal masyarakat. Tentu saja ini sangat umum terjadi sebagaimana disebutkan dalam kajian (Wahyuhana dan Sugiri, 2014) bahwa peran RDTR dalam memfasilitasi kegiatan non-pertanian mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Tentu ini menunjukkan besarnya alokasi terhadap pemukiman bertujuan untuk menunjang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan terutama Kota Bireuen. Secara detail pembagian kawasan RDTR berserta luas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luasan alokasi perencanaan pembangunan berdasarkan RDTR

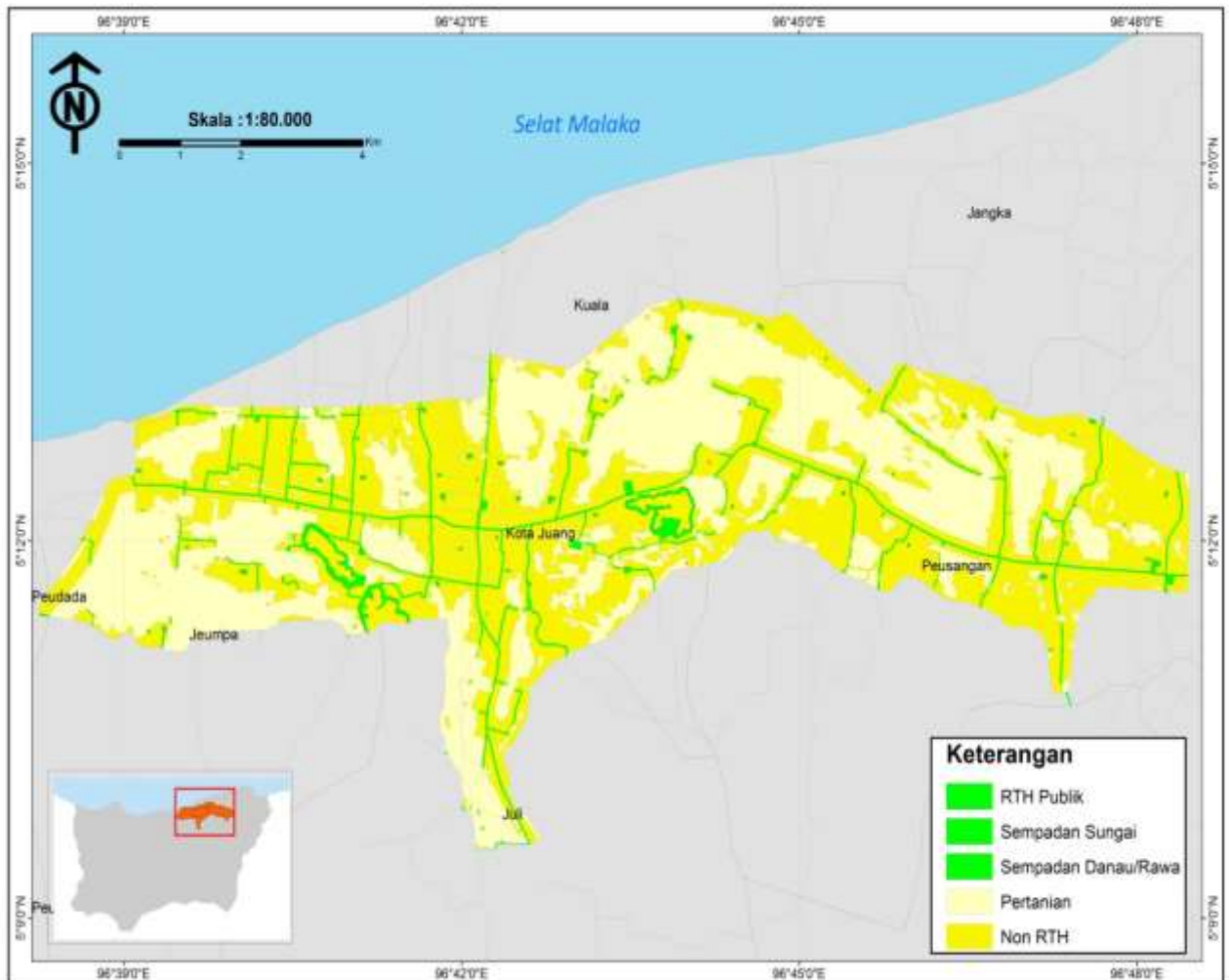
No	RDTR	Hektar (Ha)	Persentase (%)
<b>Kawasan Non-Budidaya</b>			
1	Rawa	70,12	1,10
2	RTH	39,33	0,62
3	Sempadan Danau/Rawa	40,90	0,64
4	Sempadan Sungai	11,85	0,19
<b>Kawasan Budidaya</b>			
5	Pertokoan	472,57	7,44
6	Layanan Umum	191,24	3,01
7	Perkantoran	32,51	0,51
8	Pemukiman	2.319,75	36,53
9	Pertanian	2.889,45	45,50
10	Perumahan dan Perdagangan/Jasa	273,98	4,31
11	HANKAM	9,04	0,14
Total		6.350,75	100

Berdasarkan tabel kepemilikan RTH yang dikeluarkan (Menteri Pekerjaan Umum, 2008). Ruang terbuka hijau digolongkan menjadi dua yaitu RTH publik dan *private*. Dimana pembagian RTH yang direncanakan pada RDTR Kota Bireuen yang terbesar adalah RTH *private* yang merupakan kawasan pertanian. Untuk lebih jelasnya secara detail dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Luas RTH pada RDTR di Kota Bireuen

No.	RTH Pada RDTR	Hektar (Ha)	Persentase (%)
1	RTH	39,33	0,62
2	Sempadan Danau/Rawa	40,90	0,64
3	Sempadan Sungai	11,85	0,19
4	Pertanian	2.889,45	45,50
5	Non-RTH	3.369,53	53,05
Total		6.350,75	100

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa kawasan RTH terbagi dalam empat, dimana yang terluas merupakan kawasan pertanian, dan yang terkecil adalah sempadan sungai. Untuk pembagiannya RTH, sempadan danau/rawa, dan sempadan sungai masuk sebagai RTH publik dan kawasan pertanian sebagai RTH *private*. Secara spasial sebaran RTH pada RDTR dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta RDTR Kota Bireuen

Analisis kecukupan RTH pada RDTR di hitung menggunakan rumus yaitu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Daerah}} \times 100\% = \text{Persentase Kecukupan RTH}$$

Berdasarkan rumus analisis diatas maka dapat dilihat kecukupan RTH menurut RDTR sebesar 46,95%. Dimana secara rinci hasil analisis kecukupan RTH adalah :

$$\frac{2.981,55}{6.350,75} \times 100\% = 46,95 \%$$

Dari hasil analisis kecukupan RTH berdasarkan luas, maka RTH yang direncanakan di dalam RDTR Kota Bireuen sudah melebihi 30% dari minimal kepemilikan RTH pada suatu kota berdasarkan ketentuan dari undang-undang penataan ruang. Sehingga Kota Bireuen sudah merencanakan RTH yang cukup untuk pembangunan Kota Bireuen kedepannya. Sehingga RTH yang direncanakan pada RDTR sudah mampu mencukupi kebutuhan oksigen untuk menunjang kehidupan masyarakat Kota Bireuen kedepannya.

### KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas RTH yang direncanakan di dalam RDTR sebesar 2981,55 Ha, terdiri dari RTH publik dengan luas 92,08 Ha dan RTH *private* 2.889,47 Ha terbagi kedalam empat kawasan yaitu RTH, sempadan sungai, sempadan sungai/rawa, dan pertanian.
2. RTH yang tersedia berdasarkan rencana pada RDTR di Kota Bireuen seluas 46,96%.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S., Darusman, dan A.Ali, S. 2012. Kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Banda Aceh. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Lahan*, 1(1): 10-22.
- Menteri Pekerjaan Umum. 2008. *Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan*. Jakarta.
- Pemerintahan Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*.
- Pemerintahan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Bireuen. 2013. *Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032*. Bireuen.

- Santoso, B., Hidayah, R., dan Sumardjito. 2012. Pola pemanfaatan ruang terbuka hijau pada kawasan perkampungan Plemburan Tegal, Ngaklik Sleman. *Jurnal Inersia*, VIII(1).
- Wahyuhana, R. T., dan Sugiri, A. 2014. Kajian perencanaan tata runag untuk memfasilitasi kegiatan non-pertanian di Kecamatan Sukerejo, Kabupaten Kendal. *Jurnal Wilayah Lingkungan*, 2(2).